

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan PERANGKAT DAERAH untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja KESBANGPOL) Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2019, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021.

Renja Kesbangpol Tahun 2021 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Kesbangpol Tahun 2021 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dengan demikian, Renja Kesbangpol Tahun 2021 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

Oleh sebab itu, karena tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Perubahan Kantor Kesbangpol Tahun 2016-2021, maka untuk menyusun RKPD dan Renja Kesbangpol, harus mempedomani:

- 1) RPJPN Tahun 2005-2025,
- 2) RPJMN Tahun 2014-2021,
- 3) RPJPD Provinsi Sumbar 2005-2025
- 4) RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021,
- 5) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025
- 6) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kesbangpol. Sebagai satuan kerja Perangkat Daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik mempunyai fungsi yang sangat strategis antara lain, Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Rancangan renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan

program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Kesbangpol tahun 2021 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kesbangpol adalah :

- 1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Kesbangpol.
- 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Kesbangpol dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kesbangpol disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (ANALISIS SWOT)

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam spm, maupun terhadap ikk sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PERANGKAT DAERAH dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
- 4) Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3) Sajikan Tabel T-C.32

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 - 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1. Gambaran Umum Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena - fenomena yang ada, maka visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah **Terwujudnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan, Demokratis Menuju Kabupaten Padang yang Aman dan Harmonis.**

Pelaksanaan kegiatan Kesbangpol Tahun 2019 secara umum selaras dengan Renja Kesbangpol 2019, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kesbangpol Tahun 2019 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PERANGKAT DAERAH) Tahun 2019. Renja Kesbangpol pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2021.

2. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

1) Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dan DPA Tahun Anggaran 2019, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman selaku SKPD memperoleh target alokasi anggaran belanja dengan rincian sebesar **Rp1.987.064.961,71** yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai :

• Belanja Pegawai	Rp	932.804.211,71
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.006.260.750,00
• Belanja Modal	Rp	48.000.000,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Total Realisasi belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan hanya sebesar **Rp1.874.508.385,00** atau **94,34%** dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar **Rp1.987.064.961,71**. Realisasi belanja operasi hanya sebesar **Rp1.826.508.385,00** atau **94.20%** dari anggaran belanja operasi yang ditetapkan sebesar **Rp1.939.064.961,71** sedangkan realisasi belanja modal hanya sebesar **Rp48.000.000,00** atau **100,00%** dari anggaran belanja modal yang ditetapkan sebesar **Rp48.000.000,00**.

Seluruh realisasi belanja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 mencapai **94,34%** dari yang dianggarkan. Realisasi belanja tiap program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Hasil Renja Kesbangpol Tahun 2019 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

TABEL 2.1.
CAPAIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31,209,675	30,437,500	772,175	97.53	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Kantor selama 12 bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,060,325	3,060,325	-	100.00	Terpenuhinya Pembayaran telepon dan listrik selama 12 bulan
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56,000,000	54,840,000	1,160,000	97.93	Meningkatnya Kinerja Keuangan yang akuntabel selama 12 bulan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21,600,000	21,600,000	-	100.00	Meningkatnya suasana kerja yang nyaman serta tersedianya peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,500,000	2,340,000	1,160,000	66.86	Meningkatnya wawasan karyawan/karyawati selama 12 bulan
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	10,500,000	10,191,500	308,500	97.06	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat/tamu selama 12 bulan
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	81,000,000	80,615,075	384,925	99.52	Adanya koordinasi dari tingkat Kabupaten, Dinas Instansi terkait di wilayah Kabupaten selama 12 bulan
8	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	61,200,000	61,200,000	-	100.00	Meningkatnya kinerja Swakelola sebanyak 3 (tiga) orang selama 12 bulan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8,000,000	8,000,000	-	100.00	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor sebanyak 1 (satu) unit berupa Proyektor (Infocus)
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15,000,000	14,947,500	52,500	99.65	Terpeliharanya Gedung Kantor dalam meningkatkan kenyamanan dalam bekerja selama 12 bulan
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50,000,000	47,024,500	2,975,500	94.05	Terpenuhinya jasa service, belanja penggantian suku cadang dan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas selama 12 bulan
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10,000,000	9,972,500	27,500	99.73	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin/berkala OPD selama 12 bulan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20,000,000	16,008,900	3,991,100	80.04	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap dan handal
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46,750,000	41,024,127	5,725,873	87.75	Tersedianya laporan LAKIP, LPPD, Renstra, RKA, DPA, Laporan Keuangan Semesteran pada OPD selama 12 bulan
JUMLAH PINDAH KE HALAMAN 02		417,820,000	401,261,927	16,558,073	96.04	

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PINDAHAN DARI HALAMAN 01	417,820,000	401,261,927	16,558,073	96.04	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					
15	Kegiatan Operasional komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantramtibmas di Daerah)	67,490,000	66,620,750	869,250	98.71	Terpeliharanya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di daerah selama 12 bulan
16	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	279,500,000	276,437,145	3,062,855	98.90	Terpantaunya Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah se - Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
17	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	30,597,400	30,597,400	-	100.00	Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda dengan diikuti 70 peserta dari 17 Kecamatan
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)					
18	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	26,767,600	26,767,600	-	100.00	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terhadap Generasi Muda Kabupaten Padang Pariaman dengan peserta 70 orang
19	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman	57,100,600	57,100,600	-	100.00	Terlaksananya Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) bagi ASN, Masyarakat dan Murid- Murid Sekolah di IKK Parit Malintang
	Program Pendidikan Politik Masyarakat					
20	Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula	28,726,500	28,726,500	-	100.00	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu khususnya untuk pemilih pemula yang sebelumnya belum menggunakan hak pilihnya dengan peserta sebanyak 70 orang
21	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik	18,000,000	16,326,800	1,673,200	90.70	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bantuan Dana Papol untuk Tahun 2017 sebanyak 11 Papol dan terealisasi sebanyak 11 Papol
22	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Papol	60,675,000	58,565,800	2,109,200	96.52	Terlaksananya Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Papol sebanyak 11 Papol dengan peserta 33 orang
23	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring, dan Evaluasi Ormas/LSM	11,100,000	10,456,700	643,300	94.20	Terpantaunya dan terdatanya Keberadaan Ormas dan LSM di Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
24	Dialog Politik Bersama Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat	37,878,400	37,878,400	-	100.00	Meningkatnya Pengetahuan Tokoh Masyarakat dan Ormas sebanyak 105 orang yang terdiri dari 55 Orang Tokoh Masyarakat dari 17 Kecamatan dan 33 orang dari Pengurus Partai Politik yang mendapatkan Kursi DPRD Padang Pariaman
	JUMLAH	1,035,655,500	1,010,739,622	24,915,878	97.59	

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dan DPA Tahun Anggaran 2019, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman selaku Perangkat Daerah memperoleh target pendapatan dan alokasi anggaran belanja dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 pada Kesbangpol adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri atas 8 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp295.463.910,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp288.291.288,00**. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja **97,57%**, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran **Rp37.940.000,00** dan realisasi **Rp36.944.500,00** atau sebesar **97,38%**. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat dan lancarnya proses surat menyurat dan administrasi keuangan. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2019 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya surat menyurat, Tersedianya Alat Tulis Kantor, barang cetakan, penggandaan (fotocopy), perangko dan materai.

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Anggaran **Rp57.600.000,00** dan realisasi **Rp52.980.000,00** atau sebesar **91,98%**. Kegiatan ini sebagian besar merupakan penyediaan honorarium pengelola keuangan SKPD seperti Honor KPA, PPK, PPTK,

Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, dan telah dibayar honor dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun 2019.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran **Rp22.800.000,00** dan realisasi **Rp22.793.500,00** atau sebesar **99,97%**. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dan lingkungan kantor dan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Selama Tahun 2019 penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dapat terwujud pada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

Anggaran **Rp240.000,00** dan realisasi **Rp240.000,00** atau sebesar **100%**. Selama tahun 2019 penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terwujud atau sesuai dengan target pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran **Rp12.000.000,00** dan realisasi **Rp11.899.800,00** atau sebesar **99,17%**. Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama tahun 2019 dapat disediakan. Penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu pelaksanaannya sesuai dengan agenda rapat yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

f. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Anggaran **Rp82.083.910,00** dan realisasi **Rp81.833.488,00** atau sebesar **99,69%**. Selama tahun anggaran 2019 Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah sesuai undangan serta *event* kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

g. Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran

Anggaran **Rp82.800.000,00** dan realisasi **Rp81.600.000,00** atau sebesar **98,55%**. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu pembayaran honor Tenaga Swakelola/Tenaga Kerja Non Pegawai sebanyak 4 (empat) orang.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Bulan	37,940,000.00	36,944,500.00	97.38
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	12	Bulan	57,600,000.00	52,980,000.00	91.98
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	1	Tahun	22,800,000.00	22,793,500.00	99.97
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	Tahun	240,000.00	240,000.00	100.00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	12	12	Bulan	12,000,000.00	11,899,800.00	99.17
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	1	1	Tahun	82,083,910.00	81,833,488.00	99.69
7	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	1	1	Tahun	82,800,000.00	81,600,000.00	98.55
Jumlah					295,463,910.00	288,291,288.00	97.57

2.1.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri atas 5 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp150.000.000,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp114.759.602,00** atau **76,51%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Anggaran **Rp29.000.000,00** dan realisasi **Rp29.000.000,00** atau sebesar **100,00%**. Telah tersedianya peralatan gedung kantor

sebanyak 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit PC dan 2 (dua) unit Printer.

b. Pengadaan Mebeleur

Anggaran **Rp20.000.000,00** dan realisasi **Rp20.000.000,00** atau sebesar **100,00%**. Telah tersedianya mebeleur sebanyak 4 (empat) unit meja biro eselon IV dan 4 (empat) unit kursi pejabat eselon IV.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Anggaran **Rp20.000.000,00** dan realisasi **Rp12.800.000,00** atau sebesar **64,00%**. Telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tersedia.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran **Rp64.000.000,00** dan realisasi **Rp47.854.602,00** atau sebesar **74,77%**. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional SKPD menyediakan dana untuk belanja service kendaraan, penggantian suku cadang, BBM dan pelumas, STNK serta belanja perbaikan kendaraan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran sedangkan realisasi keuangan sebesar **74.77%**, yang tidak terealisasi adalah merupakan efesiensi dalam penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil SKPD.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Anggaran **Rp17.000.000,00** dan realisasi **Rp5.105.500,00** atau sebesar **30,03%**. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran sedangkan realisasi keuangan sebesar **30.03%**, yang tidak terealisasi adalah merupakan efesiensi dalam penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil SKPD.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4	4	unit	29,000,000.00	29,000,000.00	100.00
2	Pengadaan Mebeleur	8	8	unit	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	1	Tahun	20,000,000.00	12,800,000.00	64.00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1	1	Tahun	64,000,000.00	47,854,602.00	74.77
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1	1	Tahun	17,000,000.00	5,105,000.00	30.03
J u m l a h					150,000,000.00	114,759,602.00	76.51

2.1.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini hanya terdiri atas 1 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp18.515.500,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp18.148.740,00** atau **98,02%**. Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1	1	tahun	18,515,500	18,148,740	98.02
J u m l a h					18,515,500	18,148,740	98.02

2.1.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini hanya terdiri atas 2 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp86.200.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp61.861.080,00** atau **78,77%**, dengan sisa dana sebesar

Rp10.071.720,00 yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2019.

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran **Rp19.100.000,00** dan realisasi **Rp15.332.750,00** atau sebesar **80,28%**, dengan sisa dana sebesar **Rp3.767.250,00** yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2019.

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD

Anggaran **Rp46.100.000,00** dan realisasi **Rp36.028.280,00** atau sebesar **78,15%**, dengan sisa dana sebesar **Rp10.071.720,00** yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2019.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3	3	dokumen	19,100,000	15,332,750.00	80.28
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran SKPD	6	6	dokumen	46,100,000	36,028,280.00	78.15
Jumlah					65,200,000	51,361,030.00	78.77

2.1.1.5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini terdiri atas 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp223.520.750,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp201.887.297,00** atau **90,32%** dengan sisa dana sebesar **Rp21.633.453,00** yang disebabkan karena efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2019. Pada pelaksanaan program ini indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM

Anggaran **Rp0,00** dan realisasi **Rp0,00** atau sebesar **00,00%**. Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya pengurangan dana pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

b. Kegiatan Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantramtibmas di Daerah)

Anggaran **Rp0,00** dan realisasi **Rp0,00** atau sebesar **00,00%**. Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya pengurangan dana pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

c. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten

Anggaran **Rp223.520.750,00** dan realisasi **Rp201.887.297,00** atau sebesar **90,32%** dengan sisa dana sebesar **Rp21.633.453,00**. Maksud dan Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah agar terpantau, tertangani dan tersedianya Laporan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di daerah Kabupaten Padang Pariaman selama 1 (satu) tahun di 17 (tujuh belas) Kecamatan. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yaitu tersedianya Dokumen Laporan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di daerah Kabupaten Padang Pariaman per triwulan (B.04 , B.08, B.12).

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM	0	0	Tahun	0,00	0,00	#VALUE!
2	Kegiatan Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantramtibmas di Daerah)	0	0	Tahun	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	1	1	Tahun	223,520,750.00	201,887,297.00	90.32
J u m l a h					223,520,750.00	201,887,297.00	90.32

2.1.1.6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp47.820.200,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp47.820.200,00** atau **100%**. Pada pelaksanaan program ini indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target.

a. Kegiatan Pembinaan Wawasan Bangsa

Anggaran **Rp47.820.200,00** dan realisasi **Rp47.820.200,00** atau sebesar **100%**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu meningkatnya Wawasan Kebangsaan Generasi Muda Kabupaten Padang Pariaman tentang nilai – nilai luhur bangsa.

b. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan

Anggaran **Rp0,00** dan realisasi **Rp0,00** atau sebesar **00,00%**. Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya pengurangan dana pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100	100	OK	47,820,200.00	47,820,200.00	100.00
2	Forum Pembauran Kebangsaan	0	0	OK	0.00	0.00	0.00
Jumlah					47,820,200.00	47,820,200	100.00

2.1.1.7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Program ini terdiri atas 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp166.320.000,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp164.523.460,00** atau **98.92%** dengan sisa dana sebesar **Rp1.796.540,00**. Pada pelaksanaan program ini indikator kinerja keluaran

(*output*) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi keuangan sudah memenuhi efesiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar **98.92%**, sementara target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Anggaran **Rp44.320.000,00** dan realisasi **Rp44.319.300,00** dengan sisa anggaran sebesar **Rp700,00** atau sebesar **100%**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu meningkatkan kesadaran Generasi Muda akan Bahaya Narkoba dan sejenisnya.

b. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman

Anggaran **Rp65.000.000,00** dan realisasi **Rp64.489.200,00** atau sebesar **99,21%** dengan sisa dana sebesar **Rp510.800,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman dengan Acara Lomba Gerak Jalan Jantung Sehat.

c. Kegiatan Operasional BNK

Anggaran **Rp57.000.000,00** dan realisasi **Rp55.714.960,00** atau sebesar **97,75%** dengan sisa dana sebesar **Rp1.285.040,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu terlaksananya operasional BNK di Kabupaten Padang Pariaman.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	100	100	OK	44,320,000.00	44,319,300.00	100.00
2	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kab. Padang Pariaman	17	17	Kec	65,000,000.00	64,489,200.00	99.21
3	Kegiatan Operasional BNK	3	3	Sekolah	57,000,000.00	55,714,960.00	97.75
Jumlah					166,320,000.00	164,523,460.00	98.92

2.1.1.8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini terdiri atas 4 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp145.020.390,00**. Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp141.323.906,00** atau **97,45%**. Pada pelaksanaan program ini, indikator kinerja keluaran (*output*) kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilu Kada.

Anggaran **Rp56.194.000,00** dan realisasi **Rp55.894.000,00** atau sebesar **99,47%**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu khususnya untuk pemilih pemula yang sebelumnya belum menggunakan hak pilihnya.

b. Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik

Anggaran **Rp23.000.000,00** dan realisasi **Rp20.223.516,00** atau sebesar **87.93%** dengan sisa dana sebesar **Rp2.776.484,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar terlaksananya Verifikasi terhadap Bantuan Dana Hibah yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik.

c. Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Anggaran **Rp00** dan realisasi **Rp00** atau sebesar **0%**. Kegiatan ini ditunda pelaksanaannya untuk tahun 2020 disebabkan karena adanya pengurangan dana pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

d. Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM

Anggaran **Rp19.600.000,00** dan realisasi **Rp18.980.000,00** atau sebesar **96,84%** dengan sisa dana sebesar **Rp620.000,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar terdatanya, terpantaunya Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya pendataan dan pemantauan terhadap ormas dan LSM.

e. Rapat Koordinasi tentang penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah

Anggaran **Rp46.226.390,00** dan realisasi **Rp46.226.390,00** atau sebesar **100%** dengan sisa dana sebesar **Rp0,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait dengan tujuan untuk mensukseskan pemilu Kepala daerah. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya rapat Koordinasi tentang penyelenggaraan Pemilu Kada.

Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pendidikan Politik Masyarakat dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

No.	Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	(%)
1	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	17	17	Kecamatan	19,600,000.00	18,980,000.00	96.84
2	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik	11	11	Partai	23,000,000.00	20,223,516.00	87.93
3	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	Rapat Koordinasi tentang penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah	17	17	Kecamatan	46,226,390.00	46,226,390.00	100.00
5	Fasilitasi Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pemilukada	17	17	Kecamatan	56,194,000.00	55,894,000.00	99.47
Jumlah					145,020,390	141,323,906	97.45

2.1.2. Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kesbangpol Tahun 2019

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kantor Kesbangpol dan realisasi APBD dapat kita lihat secara lebih terperinci dalam matriks terlampir.

TABEL 2.17.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KESBANGPOL DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KESBANGPOL S/D TAHUN 2019
KABUPATEN PADANG PADANG PARIAMAN RIAMAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.02.01.	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran						100	100	100
1.03.1.03.02.01.01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK, Materai, penggandaan dan cetak dokumen juknis kerja	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.03.1.03.02.01.07	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, Air, telepon & Faksimile	12 Kali / Tahun	12 Kali / Tahun	0	0	0	0	0	100
1.03.1.03.02.01.08	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium Satuan pengelola keuangan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.03.1.03.02.01.15	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
1.03.1.03.02.01.17	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk 1 tahun.	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100	4 paket	4 paket	100
1.03.1.03.02.01.18	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.02.01.19	7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
	8	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Pembayaran gaji tenaga swakelola sebanyak 4 orang								
1.03.1.03.02.02.	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi								
1.03.1.03.02.02.09	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	0	0	1 unit	1 unit	100	0	0	0
1.03.1.03.02.02.10	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (1 unit komputer dan 1 unit Laptop)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.03.1.03.02.01.24	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya mebeleur kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	100	100
1.03.1.03.02.01.26	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	100	100
1.03.1.03.02.05.	III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Ketersediaan Rencana Kerja PERANGKAT DAERAH								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.02.05.03	13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur yang mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
1.03.1.03.02.06.	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Tepat Waktu								
			Tersusunnya dok TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan								
1.03.1.03.02.06.01	14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Persentase Laporan Tepat Waktu	10 dokumen	10 Dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100	10 dokumen	100	100
	15	Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran OPD	Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Anggaran (RKA & DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun			4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	100	100
1.03.1.03.02.34.	V	Program peningkatan keamanan dan	Meningkatnya Keamanan dan								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kenyamanan lingkungan	Kenyamanan Lingkungan								
1.03.1.03.02.34.08	15	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM	Terlaksananya rapat koordinasi FKDM dan Pembekalan FKDM	0	0	100 Orang	100 Orang	100	0	0	0
			Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan FKDM se Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.34.09	16	Kegiatan Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantramtibmas di Daerah)	1. Pelaksanaan operasional kegiatan kominda dalam pengendalian kantramtibmas	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	0	0	0
			2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama unit intelijen dalam mengatasi masalah kantramtibmas								
1.03.1.03.02.34.10	17	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	Terlaksananya operasional dan koordinasi tim penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen	1 Tahun/Dokumen
			Terpantaunya dan tertanganinya konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.02.36.	VI	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara								
1.03.1.03.02.36	18	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Generasi muda yang mengikuti sosialisasi pewarisan nilai-nilai luhur bangsa	100 Orang/tahun	100 Orang/tahun	0	0	0	0	0	100
			Meningkatnya wawasan generasi muda tentang nilai-nilai luhur bangsa								
1.03.1.03.02.36.04	19	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	100 orang/Tahun	70 Orang/tahun	70 orang/tahun	100
			Meningkatnya wawasan Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan								
1.03.1.03.02.36.08	20	Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan	0	0	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim	1 Tahun/I Tim
			Meningkatnya rasa toleransi antar suku								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			bangsa								
1.03.1.03.02.39.	VI	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya								
1.03.1.03.02.39.01	21	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
			Meningkatnya kesadaran generasi muda akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.								
1.03.1.03.02.39.09	22	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman	Terlaksananya Peringatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.								
1.03.1.03.02.39.10	23	Operasional BNK	- Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun	3 Kali/Tahun

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			- Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III.a dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman						126 Orang/Tahun	126 orang /tahun	
1.03.1.03.02.40.	VI	II	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terwujudnya sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah							
1.03.1.03.02.40.10	24	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan dana Partai Politik	Verifikasi administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan parpol	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	11 parpol/tahun	100
			Terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD								
1.03.1.03.02.40.10	25	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	33 Orang	0	33 Orang	33 Orang	100	0	0	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PERANGKAT DAERAH s/d tahun berjalan	
						Target Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Realisasi Renja PERANGKAT DAERAH tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan dan								100
1.03.1.03.02.40.10	26	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas/LSM	Terlaksananya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	1 Paket/Dokumen	100
			1. Tersedianya data Ormas/LSM sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan								
			2. Terpantaunya aktifitas Ormas/LSM di Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.40.10	27	Dialog Politik Bersama Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat.	Terlaksananya Dialog Politik Bersama Pimpinan Parpol dan Tomas	84 orang/tahun	84 orang/tahun	84 orang/tahun	84 orang/tahun	84 orang/tahun	0	0	100
			Terjalannya komunikasi antara pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat								
1.03.1.03.02.40.10	28	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013	Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2013 di Kabupaten Padang Pariaman	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	60 Orang/Tahun	0	0	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan namun belum lagi optimal.

Melihat kondisi tersebut Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman selaku Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah sebagai lembaga teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan melalui :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesbang dan Politik sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kesbang dan Politik dapat kita lihat sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor KESBANGPOL Kabupaten Padang Pariaman

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2015	Tahun 2017	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Terwujudnya penyelenggaraan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan serta terciptanya pemilu yang berkualitas	Kegiatan pembinaan politik daerah		2 Keg	4 Keg	5 Keg	2 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	
				13	13	13	13	13	13	13	11	
2	Meningkatkan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam kerangka NKRI	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		0 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	
				0 Keg	142	145	145	142	142	142	142	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggara unsur pemerintahan daerah dalam urusan wajib yang di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sebagai satuan kerja Perangkat Daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas

dibidang kesatuan bangsa dan politik, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK

RINGKASAN TUGAS :

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik menetapkan program kerja kantor dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor.
2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis kantor sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian daerah.
4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kepegawaian daerah.
5. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, fungsi dan pengadaan, mutasi kepegawaian, data dan pengembangan pegawai, disiplin dan pembenahan.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan kantor.
7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPD dan LPPD Kantor serta pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan diklat pimpinan diklat teknis.
8. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kepegawaian daerah.
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

RINGKASAN TUGAS :

Menyiapkan Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.
2. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

URAIAN TUGAS :

1. Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program kantor.
2. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.
4. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.
5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
6. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaaan dan ketatalaksanaan kantor.
7. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
8. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat.
9. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
10. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional.
11. Menyelenggarakan pengkajian bahan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD kantor.
12. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
13. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. KEPALA SEKSI KESATUAN BANGSA

RINGKASAN TUGAS

Menyusun rencana, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa berdasarkan peraturan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

1. URUSAN BIDANG BINA IDEOLOGI

- a. Melaksanakan program kerja bina ideologi.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bina ideologi.
- c. Melaksanakan Penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan bina ideologi.
- d. Melaksanakan pengelolaan data bina ideologi.
- e. Melaksanakan bahan koordinasi bina ideologi.
- f. Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

2. URUSAN BINA WAWASAN KEBANGSAAN

- a. Melaksanakan program kerja Bina Wawasan Kebangsaan.
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bina Wawasan Kebangsaan.
- c. Melaksanakan Penyusunan bahan fasilitas penyelenggaraan Bina Wawasan Kebangsaan.
- d. Melaksanakan pengelolaan data Bina Wawasan Kebangsaan.
- e. Melaksanakan bahan koordinasi Bina Wawasan Kebangsaan.
- f. Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

3. URUSAN KEWASPADAAN

- a. Melaksanakan pengkajian program kerja bina Kewaspadaan.

- b. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis bina Kewaspadaan.
- c. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi kewaspadaan.
- d. Melaksanakan fasilitasi kewaspadaan.
- e. Melaksanakan koordinasi kewaspadaan.
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kewaspadaan.
- g. Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi koordinasi kewaspadaan.
- i. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- k. Menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan.
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. KEPALA SEKSI PEMBINAAN POLITIK

RINGKASAN TUGAS :

Menyusun rencana, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Politik, serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Pembinaan Politik berdasarkan peraturan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

- 1. Melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan politik.
- 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan politik.
- 3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik.
- 4. Melaksanakan pengelolaan data fasilitasi parpol pembinaan politik.
- 5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha fasilitas parpol.

6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi fasilitasi parpol.
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pembinaan politik.
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembinaan politik.
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam ruang lingkup kedinasan.

5. KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

RINGKASAN TUGAS :

Menyusun rencana, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga, menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

RINCIAN TUGAS :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
4. Melaksanakan pengelolaan data fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha fasilitas Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga dan Ormas.
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam ruang lingkup kedinasan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan PERANGKAT DAERAH lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, eselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

TABEL 2.2
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2
2	III	5
3	II	3
4	I	1
	Jumlah	11 Orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kesbangpol April Tahun 2017

Komposisi pejabat eselonering di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

TABEL 2.3
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN ESSELONERING

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	4
	Jumlah	5 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kesbangpol Tahun 2017

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Masih kurangnya sumberdaya Manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Kantor Kesbangpol.
2. Jumlah pegawai Kantor Kesbangpol yang telah memiliki Sertifikat pengadaan barang/jasa masih sedikit.
3. Adanya keterlambatan regulasi baik ditingkat pusat maupun propinsi dan Kabupaten, sehingga dalam penyusunan dokumen pelaksana anggaran (DPA) PERANGKAT DAERAH yang sudah ditetapkan harus dirubah dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru.

4. Belum optimalnya dokumen perencanaan dari personil yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dibidang perencanaan sebelumnya.
5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang memandai dan telah banyaknya yang rusak tidak dapat mencapai hasil yang di harapkan ini disebabkan sebagian dari Sarana dan Prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak dan untuk mengoperasikan membutuhkan dana yang besar.

Adapun dampak dengan adanya permasalahan diatas adalah tidak maksimalnya perencanaan, penganggaran serta realiasi pelaksanaan setiap kegiatan. Untuk kedepan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada maka dari itu semua personil saling membantu dalam pelaksanaan semua kegiatan. Dan berikut formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah : Setiap kasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan masing –masing untuk mempersiapkan kerangka acuan kerja (KAK) nya terlebih dahulu yang memuat tentang detail rencana pelaksanaan kegiatan seperti : Maksud dan tujuan, RKA masing-masing kegiatan, jadwal pelaksanaan sampai dengan pihak terkait dengan kegiatan tersebut.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 disusun dengan mempedomani 1). RPJPN tahun 2005 – 2025, 2). RPJMN 2017-2021, 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005 – 2025, 4). RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005 – 2025, 5). RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 -2021, 6). Renstra Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Paddag Pariaman Tahun 2016 – 2021. Hal ini untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja Perangkat Daerah yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (hasil Musrenbang)

Rencana kerja (Renja) Kantor Kesbangpol tahun 2021 merupakan rencana kerja akan disusun untuk dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesbangpol (Renstra

Kesbangpol) tahun 2016 – 2021, Renja Kantor Kesbangpol disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan pada Rencana Kerja pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indicator makro. Indicator ekonomi dan social.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan sinergitas perencanaan mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan Perangkat Daerah, maka tahun 2021 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak ada usulan skala prioritas dari hasil musrenbang. Adapun program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana tahun 2021 berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2017 – 2021, maka tema RKP Tahun 2021 adalah ***Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial***.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2017-2021 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja Kantor Kesbang dan Politik Tahun 2021 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Kantor Kesbangpol Tahun 2021 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Matrik Keterkaitan Antara RPJPN, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025

Visi Misi RPJPN Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
<i>Indonesia Yang Manadiri, Maju, adil dan Makmur</i>		<i>Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1	Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah",	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasiskan nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	2	Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	3	Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4	Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari			6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional				

8	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional			
---	---	--	--	--

Tabel 3.2. Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2017-2021 dengan Visi Misi Padang Pariaman Tahun 2016-2021

VISI RPJMN TAHUN 2017-2021		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
<i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
	MISI RPJMN TAHUN 2015-2021		MISI RPJPD TAHUN 2005-2025
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 tidak lepas dari pencapaian visi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 yakni :

Terwujudnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan, Demokratis Menuju Kabupaten Padang yang Aman dan Harmonis"

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 karena tahun 2021 merupakan tahun pertama dari periode kedua pelaksanaan RPJMD (Tahun 2016-2021) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2021. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan RKPD

Tahun 2021 maka tema RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 adalah **Mempercepat Pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial dengan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan SDM** yang Berkualitas dan prioritas pembangunan adalah:

Tabel 3.4
Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman 2021

Tema Pembangunan Padang Pariaman Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021
Mempercepat Pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial dengan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan SDM	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya
	Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Pengembangan Potensi Pariwisata Unggulan
	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berbasis Tata Ruang
	Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah
	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah
	Pengurangan Resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana

Tabel 3.5
Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menurut Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2021	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah

1.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	▪ Upaya peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan agama ▪ Upaya peningkatan peran lembaga sosial keagamaan ▪ Peran aktif lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah ▪ Peningkatan kerukunan Dalam Kelompok Masyarakat dalam upaya menjaga dan mempertahankan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat ▪ Pengembangan dan pelestarian budaya daerah ▪ Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya ▪ Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama ▪ Masih maraknya penyakit masyarakat dan permasalahan sosial
		▪ Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas dan narkoba
2.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusiadan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	▪ Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing ▪ Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Padang Pariaman ▪ Peningkatan Profesional dan kuantitas guru sebagai pendidik ▪ Belum tuntasnya peningk. kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan ▪ Peningkatan profesional pengelola & kualitas manajemen pendidikan ▪ Belum optimalnya penduduk usia sekolah yg mendapatkan layanan pendidikan ▪ Ketimpangan distribusi guru di beberapa wilayah. ▪ Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga ▪ Meningkatnya prestasi olahraga ▪ Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan ▪ Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan ▪ Permasalahan Penanggulangan HIV/AIDS ▪ Pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal ▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana Rumah Sakit ▪ Tingginya status gizi buruk masyarakat dan prevalensi balita pendek belum dapat dikendalikan secara maksimal (Stunting)
3.	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	▪ Pembangunan infrastruktur lebih memperhatikan fungsi lingkungan ▪ Pengembangan daerah baru yang strategis (tarok city_ ▪ Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah ▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan ▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi ▪ Peningkatan akses Universal ▪ Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ▪ Mengembangkan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis ▪ Meningkatkan kualitas perencanaan ruang

4.	Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.	▪ Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah ▪ Peningkatan produksi komoditi unggulan ▪ Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan ▪ Meningkatkan sarana dan Prasarana produksi pertanian ▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi unggulan daerah ▪ Daya saing produk pertanian relatif masih rendah ▪ Belum berkembangnya nilai tambah produk pertanian ▪ Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu peningkatan ▪ Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi,
----	---	---

		pemasaran dan permodalan terbatas ▪ Konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan ▪ Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan ▪ Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran ▪ Optimalisasi penerimaan daerah
5.	Peningkatan Potensi Pariwisata Unggulan.	▪ Mengembangkan Destinasi Wisata yang layak ▪ meningkatkan kompetensi peran pelaku wisata ▪ Peningkatan pelaku ekonomi kreatif
6.	Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah.	▪ Pemberdayaan UKM, Industri Kecil Menengah, Koprasi dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri ▪ Kemudahan berinvestasi di daerah ▪ Pengembangan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah ▪ Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta optimalisasi perlindungan konsumen ▪ Mengembangkan Industri pengolahan berbasis komoditi unggulan ▪ Mengembangkan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah ▪ Perlunya penguatan agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan ▪ Kualitas produk hasil olahan belum berdaya saing dan masih berorientasi lokal ▪ Pemerataan ekonomi
7.	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.	▪ Masih melambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran ▪ Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk menurunkan jumlah penduduk miskin ▪ penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif ▪ Peningkatan kapasitas pelatihan kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru ▪ Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana serta keluarga sejahtera yang berwawasan kependudukan ▪ Peningkatan kesempatan berusaha ▪ Peningkatan kegiatan ekonomi produktif ▪ Peningkatan jiwa kewirausahaan
8.	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah.	▪ Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ▪ Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah ▪ Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah ▪ Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah ▪ Peningkatan kualitas pelayanan publik ▪ Pengembangan e-gov dan implementasi smart city



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

		Kabupaten Padang Pariaman
9.	Pengurangan resiko bencana, kesiap siagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.	▪ Pengelolaan abrasi pantai ▪ Kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kebencanaan ▪ Pengembangan Nagari Tangguh bencana ▪ Peningkatan penanganan siaga tanggap darurat ▪ Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana ▪ Masih kurangnya regulasi dan koordinasi penanggulangan kebencanaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja Kantor Kesbang dan Politik tahun 2021 sesuai dengan prioritas yang ke delapan yaitu *Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah* maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kesbang dan Politik Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA (THN)				
				2016	2017	2019	2019	2021
1		2	3	7	9	11	13	14
1	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	0%	0%	0%	75%	78%
		Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	55%	60%	60%	60%	60%
		Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	11 partai politik	11 partai politik	11 partai politik	13 partai politik	13 partai politik
2	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan peran aktif	Menurunnya kasus narkoba	Jumlah kasus Narkoba di	54	36	33	30	25

	masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Miras	ditengah masyarakat	tengah masyarakat.					
4	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Pemahaman, Kesadaran dan Fasilitas Kehidupan Berpolitik.	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.	1. Mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman, langsung, umum, bebas dan rahasia 1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah 2. Peningkatan peran dan Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan & kehidupan politik serta perluasan system informasi politik 3. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat 4. Peningkatan peran

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	& kapasitas pengurus parpol dalam sistem politik 1. Memasyarakatkan pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip HAM beserta peraturan perundangannya kepada masyarakat 2. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap ormas / LSM 3. Peningkatan peran & kapasitas pengurus ormas sebagai mitra pemerintah
		Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	1. Melakukan Pembinaan kepada partai politik tentang tata kelola keuangan 2. Melakukan bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. 3. Memberikan pemahaman kepada pengurus partai politik tentang aturan dan perundangan untuk tata kelola keuangan dan pencairan bantuan. 4. Memberikan arahan kepada partai politik untuk mematuhi aturan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			yang berlaku
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan terhadap Gangguan yang Timbul di Masyarakat.	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.	1. Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas 2. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas 3. Meningkatkan kemampuan Dan ketrampilan aparat intelijen
Meningkatkan Partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Miras	Menurunnya kasus Narkoba ditengah masyarakat.	1. Meningkatkan koordinasi antar unsur pemberantas narkoba 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini penyalahgunaan narkoba 3. Meningkatkan kualitas penyuluhan tentang bahaya narkoba 4. Tindak lanjut hasil pelaksanaan test urine
Mewujudkan yang memiliki pemahaman tentang nilai – nilai Wawasan Kebangsaan.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat 2. Menggali & memantapkan kembali rasa Cinta tanah air & bangsa, kesadaran bela negara, seni

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			& budaya dalam kehidupan masyarakat 3. Menyertakan elemen Masyarakat dalam pembinaan / seminar / sosialisasi tentang wawasan kebangsaan & bela negara

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin Perangkat Daerah, pada tahun 2021 Kantor Kesbang dan Politik menyelenggarakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yang secara keseluruhan meliputi 6 program dan 9 kegiatan dan 25 Sub kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 1.350.000.000,-

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan Kantor Kesbang dan Politik Tahun 2021 adalah sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 matriks berikut ini :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MENURUT PERMENDAGARI 13 TAHUN 2006**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		KET
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Renja 2020	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA				2,260,366,437				3,932,443,362	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
	BELANJA LANGSUNG			-	1,350,000,000				2,396,200,000	
1.03.1.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kesbangpol	100%	328,000,000			100%	308,200,000	
1.03.1.03.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya ATK, Materai, penggandaan dan cetak dokumen juknis kerja	Kesbangpol	1 Tahun	35,000,000	DAU		1 Tahun	50,000,000	
1.03.1.03.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium Satuan pengelola keuangan	Kesbangpol	1 tahun	60,000,000	DAU		1 tahun	65,000,000	
1.03.1.03.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	Kesbangpol	1 tahun	30,000,000	DAU		1 tahun	30,000,000	

1.03.1.03.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk 1 tahun.	Kesbangpol	1 tahun	12,000,000	DAU		1 tahun	12,000,000	
1.03.1.03.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	Kesbangpol	1 tahun	15,000,000	DAU		1 tahun	15,000,000	
1.03.1.03.02.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kesbangpol	1 tahun	50,000,000			1 tahun	75,000,000	
1.03.1.03.02.01.19	Penyediaan jasa pendukung perkantoran	Pembayaran gaji tenaga swakelola sebanyak 4 orang	Kesbangpol	12 bulan	126,000,000	DAU		12 bulan	61,200,000	
1.03.1.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kesbangpol	100%	383,600,000	DAU		100%	578,000,000	
1.03.1.03.02.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	Kesbangpol	1 Unit	285,600,000	DAU		1 Unit	400,000,000	
1.03.1.03.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (2 unit komputer dan 2 unit printer)	Kesbangpol	1 tahun	30,000,000			1 tahun	30,000,000	
1.03.1.03.02.02.10	Pengadaan mobiler	Tersedianya mebeleur kantor	Kesbangpol	1 paket	-	DAU		1 paket	20,000,000	
1.03.1.03.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kesbangpol	1 tahun	-	DAU		1 tahun	20,000,000	
1.03.1.03.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kesbangpol	1 tahun	50,000,000	DAU		1 tahun	90,000,000	
1.03.1.03.02.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kesbangpol	1 tahun	18,000,000	DAU		1 tahun	18,000,000	

1.03.1.03.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Ketersediaan Rencana Kerja SKPD	Kesbangpol	100%	30,000,000	DAU	100%	30,000,000	
1.03.1.03.02.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Aparatur yang mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	Kesbangpol	11 orang	30,000,000	DAU	11 orang	30,000,000	
1.03.1.03.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Tepat Waktu	Kesbangpol	100%	70,000,000	DAU	100%	80,000,000	
1.03.1.03.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output: Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan kinerja per bulan) yang disusun	Kesbangpol	4 Laporan	30,000,000		4 Laporan	30,000,000	
1.03.1.03.02.06.07	Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran OPD	Output : Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Anggaran (RKA & DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun	Kesbangpol	8 Dokumen	40,000,000		8 Dokumen	50,000,000	
1.03.1.03.02.34	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Kesbangpol	100%	243,400,000	DAU	100%	400,000,000	
1.03.1.03.02.34.08	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM	Terbentuknya FKDM dan Pembekalan FKDM	Kesbangpol	1 Tim	50,000,000	DAU	1 Tim	150,000,000	
		Terbentuknya FKDM dan Pembekalan FKDM		1 Tim			1 Tim		

		Tersosialisasinya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan FKDM		150 orang		DAU		150 orang		
1.03.1.03.02.34.12	Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah*	1. Terlaksananya fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Kesbangpol	1 Tahun	50,000,000	DAU	Permeng dagri Nomor 2 Tahun 2018	12 kegiatan	100,000,000	
		2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama TKDPD								
		Terpantaunya dan terkendalinya kantrantibmas 17 diwilayah kecamatan								
1.03.1.03.02.34.10	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	Terlaksananya operasional dan koordinasi tim penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman	Kesbangpol	1 tahun	143,400,000			1 tahun	150,000,000	
		Terpantaunya dan tertanganinya koflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.36	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	Kesbangpol	100%	40,000,000	DAU		100%	210,000,000	
1.03.1.03.02.36.04	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	Kesbangpol	100 orang	40,000,000			100 orang	50,000,000	
		Meningkatnya wawasan Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan				DAU				
1.03.1.03.02.36.08	Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan	Kesbangpol	1 Tahun	-	DAU		1 Tahun	50,000,000	

		Meningkatnya rasa toleransi antar suku bangsa								
1.03.1.03.02.36....	Penguatan wawasan bela negara	Terlaksananya penguatan wawasan bela negara	Kesbangpol	60 orang	-	DAU		60 orang	35,000,000	
1.03.1.03.02.36.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Generasi muda yang mengikuti sosialisasi pewarisan nilai-nilai luhur bangsa	Kesbangpol	150 Orang	-	DAU		100 Orang	75,000,000	
		Meningkatnya wawasan generasi muda tentang nilai-nilai luhur bangsa								
1.03.1.03.02.36.08	Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan	Kesbangpol	1 Tahun	-	DAU		1 Tahun	-	
		Meningkatnya rasa toleransi antar suku bangsa								
1.03.1.03.02.39	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah kasus narkoba	Kesbangpol	25 kasus	120,000,000			25 kasus	415,000,000	
1.03.1.03.02.39.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	Kesbangpol	200 Orang	-	DAU		200 Orang	100,000,000	
		Meningkatnya kesadaran generasi muda akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.	Kesbangpol							
1.03.1.03.02.39.09	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman	Terlaksananya Peringatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018	Kesbangpol	1 kali	60,000,000	DAU		1 kali	65,000,000	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.	Kesbangpol			DAU				

1.03.1.03.02.39.10	Operasional BNK	- Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba	Kesbangpol	3 Sekolah	60,000,000	DAU		3 Sekolah	250,000,000	
		- Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III.a dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman	Kesbangpol			DAU		150 orang		
		-Terlaksananya Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba dan tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III.a dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman								
		- Pembinaan kepada Kampung Korong Bebas dari Pengguna Narkoba	Kesbangpol	1 Korong				1 Korong		
1.03.1.03.02.40	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	Kesbangpol	13 partai politik	135,000,000	DAU		13 partai politik	375,000,000	
		Persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif		60%		DAU		60%		
1.03.1.03.02.40.10	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan dana Partai Politik	Verifikasi administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan parpol	Kesbangpol	10 Parpol	50,000,000	DAU		10 Parpol	50,000,000	
		Terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD								
1.03.1.03.02.40.11	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	Kesbangpol	33 orang	60,000,000	DAU		33 orang	75,000,000	

		Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol								
1.03.1.03.02.40.13	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas/LSM	Terlaksananya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	Kesbangpol	1 Dokumen	25,000,000	DAU		1 Dokumen	75,000,000	
		1. Tersedianya data Ormas/LSM sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan								
		2. Terpantaunya aktifitas Ormas/LSM di Kabupaten Padang Pariaman								
1.03.1.03.02.40.14	Dialog Politik Bersama Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat.	Terlaksananya Dialog Politik Bersama Pimpinan Parpol dan Tomas	Kesbangpol	200 orang	-	DAU		150 orang	100,000,000	
		Terjalannya komunikasi antara pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat								
1.03.1.03.02.40	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Keormasan	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Keormasan	Kesbangpol	75 Orang	-	DAU		75 Orang	75,000,000	
		Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus Ormas akan fungsi dan peran serta Ormas dalam kehidupan bernegara								

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MENURUT PERMENDAGARI 90 TAHUN 2019**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	Targe t Akhir Perio de RPJM D	REAL ISASI CAPA IAN RKPD TAHU N 2019	PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RKPD TAHU N 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
										TARG ET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		
														NASIONA L	DAERA H	
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM(KESBANGPO L)						1,350,000,000					
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						778,400,000					
X	X X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	778,400,000	Kesbangpo I				
						Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %						
						Persentase Ketersediaan Rencana Kerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %						

						Persentase Laporan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %						
X	X	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Rencana Kerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %		Kesbangpo I				
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Anggaran (RKA & DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun	100%	100%	100%	8 Doku men	40,000,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
						Jumlah Tenaga Pembatu Pengadministrasi an				1 Orang	21,600,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %		Kesbangpo I				
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman	100%	100%	1 Tahun	1 Tahun	-	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol

X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output: Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan kinerja per bulan) yang disusun	100%	100%	4 Laporan	4 Laporan	30,000,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
						Jumlah Tenaga Pembantu Pengadministrasian				1 Orang	21,600,000	..				
X	XX	01	2.03		Kegiatan Administrasi Umum :											
X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	1 Tahun	35,000,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
						Jumlah Tenaga Pembantu Pengadministrasian				1 Orang	19,200,000	..	DAU			Kesbangpol
X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PP K dan Bendahara yang disediakan	100%	100%	100%	1 tahun	60,000,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang	100%	100%	100%	1 tahun	30,000,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol

						disediakan										
X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	100%	1 tahun	12,000,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	100%	100%	100%	1 tahun	15,000,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	1 tahun	50,000,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	100%	0%	0%	1 Unit	295,600,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	0%	1 tahun	30,000,000	Kesbangpol				Kesbangpol
X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeuler	Jumlah pengadaan mebeleur kantor (meja,kursi kerja, lemari arsip, dll)	100%	100%	0%	1 paket	-	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dilaksanakan	100%	100%	0%	1 tahun	-	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol

X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan	100%	100%	100%	1 tahun	50,000,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
						Jumlah Tenaga Supir				1 Orang	20,400,000	..	DAU			Kesbangpol
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan	100%	100%	100%	1 tahun	18,000,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
X	XX	01	2.04	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan	100%	50%	50%	11 orang	30,000,000	Kesbangpol	DAU			Kesbangpol
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						571,600,000					
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100 %	100 %	100 %	100 %	40,000,000	Kesbangpol		Revolusi mental dan pengembangan kebudayaan	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	

8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	100%	0%	80 orang	40,000,000	Kesbangpol	DAU			Ormas/LSM, guru dan Generasi Muda
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Laporan pertanggungja waban Parpol tepat waktu				10 partai politik	110,000,000	Kesbangpol		Stabilitas Polhukha nkam dan tranform asi pelayanan publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	

8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan Parpol yang di Verifikasi	10 Parpol	100%	10 Parpol	10 Parpol	50,000,000	Kesbangpol	DAU			Partai Politik
						Terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD										

8	01	03	2. 01	04		Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	100%	0%	0%	33 orang	60,000,000	Kesbangpol	DAU			Pengurus Partai Politik
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol										
						Terlaksananya Dialog Politik Bersama Pimpinan Parpol dan Tomas	100%	0%	0%	100 orang	-	Kesbangpol	DAU			Pimpinan Daerah, Pimpinan Parpol dan Tokoh Masyarakat
						Terjalannya komunikasi antara pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat										

8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	25,000,000	Kesbangpo I		Stabilitas Polhukha nkam dan transfor masi Pelayana n Publik	Pening katan Kinerja dan Pelayan an Daerah	
8	01	04	2. 01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											
8	01	04	2. 01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Terlaksananya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	100%	100%	1 Doku men	1 Doku men	25,000,000	Kesbangpol	DAU			Ormas dan Tim Updating
						Tersedianya data Ormas/LSM sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan										

						Terpantaunya aktifitas Ormas/LSM di Kabupaten Padang Pariaman										
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Keormasan	100%	0%	0%	75 Orang	-	Kesbangpol	DAU			
						Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus Ormas akan fungsi dan peran serta Ormas dalam kehidupan bernegara										
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah kasus narkoba	25 kasus	30 kasus	30 kasus	25 kasus	125,000,000	Kesbangpol		Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											

8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	100%	100%	100%	100 Orang	-	Kesbangpol	DAU		Generasi Muda
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Peringatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018	100%	100%	0%	1 kali	65,000,000	Kesbangpol	DAU		Masyarakat
						Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.						Kesbangpol			
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba	100%	100%	0%	3 Sekolah	60,000,000	Kesbangpol	DAU		SMA
						Jumlah Tenaga Pembantu Pengadministrasian				1 Orang	21,600,000	Kesbangpol	DAU		

8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100 %	100 %	100 %	100 %	271,600,000	Kesbangpo I	DAU	Stabilitas Polhukha nkam dan transfor masi Pelayana n Publik	Pening katan Kinerja dan Pelayan an Daerah	
8	01	06	2. 01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											
8	01	06	2. 01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	[1] Rapat Tim FKDM [2] Rakor FKDM [3] Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	100%	0%	0%	1 Tim	50,000,000	Kesbangpol	DAU			Tim FKDM
						[1] Rapat TKDPD	100%	0%	0%	1 Tim	50,000,000	Kesbangpol	DAU			TKDPD
						Terlaksananya operasional dan koordinasi tim penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman	100%	100%	100%	100%	150,000,000	Kesbangpol	DAU			Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

						Terpantaunya dan terkendalinya kantrantibmas 17 diwilayah kecamatan										
						Jumlah Tenaga Pembatu Pengadministrasi an	100%	0%	0%	1 Orang	21,600,000	Kesbangpol	DAU			

PEMETAAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MENURUT PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 DENGAN PERMENDAGARI 90 TAHUN 2019

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN N	INDIKAT OR	SUB KEGIATAN	INDIKATO R SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUS AN	KODE							
1.03.1.03.02.01.	TENTRAM AN, KETERTIB AN UMUM DAN LINMAS		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkata n Pelayanan Administra si Perkantora n					Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi		PEMER INTAH AN UMUM	X	X	X	0 1				
1.03.1.03.02.01.01			Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersediany a ATK, Materai, pengganda an dan cetak dokumen juknis kerja	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaa n yang disediakan	Administrasi Umum	-	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	X	0 1 . 0 3	2		0 1	

1.03.1.03. 02.01.07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium Satuan pengelola keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium PA,KPA,PPT K,PPK dan Bendahara yang disediakan	Administrasi Umum	-	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	0
													X	X	1	0	7
1.03.1.03. 02.01.08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediany a bahan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan	Administrasi Umum	-	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	0
													X	X	1	0	8
1.03.1.03. 02.01.15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersediany a bahan bacaan untuk 1 tahun.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang- undangan yang disediakan	Administrasi Umum		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	1
													X	X	1	0	5

1.03.1.03. 02.01.17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum rapat dan tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	Administrasi Umum		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	1
													X	X	1	.	7
																0	3
1.03.1.03. 02.01.18			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	Administrasi Umum		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	1
																1	8
1.03.1.03. 02.01.19			Penyediaan jasa pendukung perkantoran	Pembayaran gaji tenaga swakelola sebanyak 4 orang							KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

1.03.1.03.02.02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi					Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.03.1.03.02.02			Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Administrasi Umum		Program penunjang urusan pemerintahan daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	2
													X	X	1	0	0
																3	
1.03.1.03.02.02.09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (2 unit komputer dan 2 unit printer)	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum		Program penunjang urusan pemerintahan daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	2
													X	X	1	0	4
																3	
1.03.1.03.02.02.10			Pengadaan mobiler	Tersedianya mebeleur kantor	Pengadaan Mebeuler	Jumlah pengadaan mebeleur kantor (meja, kursi kerja, lemari arsip, dll)	Administrasi Umum		Program penunjang urusan pemerintahan daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	2
													X	X	1	0	5
																3	
1.03.1.03.02.02.22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dilaksanakan	Administrasi Umum		Program penunjang urusan pemerintahan daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	2
													X	X	1	0	8
																3	

1.03.1.03. 02.02.24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan	Administrasi Umum		Program penunjang urusan pemerintahan daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	3
													X	X	1	0	0
1.03.1.03. 02.02.26			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan	Administrasi Umum		Program penunjang urusan pemerintahan daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	3
													X	X	1	0	4
1.03.1.03. 02.05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Ketersediaan Rencana Kerja SKPD					Program penunjang urusan pemerintahan daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.03.1.03. 02.05.03			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur yang mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program penunjang urusan pemerintahan daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	1
													X	X	1	0	4
1.03.1.03. 02.06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Tepat Waktu	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

1.03.1.03. 02.06.01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output: Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan kinerja per bulan) yang disusun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output: Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan kinerja per bulan) yang disusun	Administrasi Keuangan		Program penunjang urusan pemerintahan daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	0
													X	X	1	.	6
																0	2
1.03.1.03. 02.06.07			Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran OPD	Output : Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Anggaran (RKA & DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, Renstra) Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Anggaran (RKA & DPA Awal, RKA dan DPA Perubahan) yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program penunjang urusan pemerintahan daerah		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		X	X	0	2	0
													X	X	1	.	1
																0	1

1.03.1.03. 02.34.09			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0 1	0 6		
1.03.1.03. 02.34.08			Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM	Terlaksananya rapat koordinasi FKDM dan Pembekalan FKDM	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	[1] Rapat Tim FKDM [2] Rakor FKDM [3} Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	[1] Rapat Tim FKDM [2] Rakor FKDM [3} Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0 1	0 6	2 .0 1	0 4

1.03.1.03.02.34.			Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah*	1. Terlaksananya fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	[1] Rapat TKDPD	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	♦ Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0	0	2	0
				2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama TKDPD							KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

				Terpantau nya dan terkendalin ya kantrantib mas 17 diwilayah kecamatan							KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.03.1.03. 02.34.10			Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	Terlaksana nya operasiona l dan koordinasi tim penangan n konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	[1] Rapat Timdu Penanganan Konflik Sosial(PKS) [2] Rakor Timdu PKS,	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaa n Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	♦ Pembekalan pencegahan aksi radikalisme dan potensi aksi terorisme di daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0 1	0 6	2 . 0 1	0 4

				Terpantau nya dan tertangani nya koflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman				♦ [1] Rapat Timdu Penanganan Konflik Sosial(PKS) [2] Rakor Timdu PKS	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
								♦ [1] Monitoring Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab/Kota [2] Laporan Rencana Aksi									
1.03.1.03. 02.36			Program pengemban gan wawasan kebangsaan	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

1.03.1.03. 02.36.04			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0	0	2	0
				Meningkatnya wawasan Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan		Meningkatnya wawasan Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

1.03.1.03. 02.36....			Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksana nya Forum Pembauran Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksanan ya Forum Pembauran Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0	0	2	0
				Meningkat nya rasa toleransi antar suku bangsa		Meningkatny a rasa toleransi antar suku bangsa					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.03.1.03. 02.36.03			Penguatan wawasan bela negara	Terlaksana nya penguatan wawasan bela negara	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksanan ya penguatan wawasan bela negara	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0	0	2	0

1.03.1.03. 02.36.03			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Generasi muda yang mengikuti sosialisasi pewarisan nilai-nilai luhur bangsa	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Generasi muda yang mengikuti sosialisasi pewarisan nilai-nilai luhur bangsa	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0	0	2	0
				Meningkatnya wawasan generasi muda tentang nilai-nilai luhur bangsa		Meningkatnya wawasan generasi muda tentang nilai-nilai luhur bangsa					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.03.1.03. 02.39			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah kasus narkoba					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah kasus narkoba	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0	0		
1.03.1.03. 02.39.01			Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0	0	2	0

				keras dan narkoba	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
				Meningkatnya kesadaran generasi muda akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.							KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.03.1.03.02.39.09			Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman	Terlaksananya Peringatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Peringatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0	0	2	0
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba dan sejenisnya.					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

1.03.1.03. 02.39.10			Operasional BNK	- Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaa n Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0	0	2	0
				- Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III.a dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman		- Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III.a dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
				- Terlaksana nya Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba dan tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III.a dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman		- Terlaksanan ya Razia BNK sekaligus Penyuluhan Anti Narkoba dan tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III.a dan Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

				- Pembinaan kepada Kampung Korong Bebas dari Pengguna Narkoba		- Pembinaan kepada Kampung Korong Bebas dari Pengguna Narkoba					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.03.1.03.02.40			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
				Persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif						Persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

1.03.1.03. 02.40.10			Pembinaan dan Pengawasan Bantuan dana Partai Politik	Verifikasi administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan parpol	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Verifikasi administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan parpol	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0	0	2	0
												1	3	0	1	3
1.03.1.03. 02.40.10			Pembinaan dan Pengawasan Bantuan dana Partai Politik	Verifikasi administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan parpol		Verifikasi administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan parpol			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

				Terealisasi nya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatk an kursi di DPRD		Terealisasi a bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatka n kursi di DPRD					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.03.1.03. 02.40.11			Pembekalan Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Parpol	Workshop/ Bimtek Pembekala n Pengajuan dan Pertanggung ngjawaban Bantuan Keuangan Parpol	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Workshop/Bi mtek Pembekalan Pengajuan dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Parpol	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemil ihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0 1	0 3	2 . 0 1	0 4

				Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparaturnya dalam proses pengajuan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol		Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparaturnya dalam proses pengajuan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.03.1.03.02.40.13			Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas/LSM	Terlaksananya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Terlaksananya Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	01	04	201	04
				Tersedianya data Ormas/LSM sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan		Tersedianya data Ormas/LSM sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

				Terpantau nya aktifitas Ormas/LS M di Kabupaten Padang Pariaman		Terpantaun ya aktifitas Ormas/LSM di Kabupaten Padang Pariaman					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.03.1.03. 02.40.14			Dialog Politik Bersama Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat.	Terlaksana nya Dialog Politik Bersama Pimpinan Parpol dan Tomas	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksanan ya Dialog Politik Bersama Pimpinan Parpol dan Tomas	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemil ihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0 1	0 3	2 . 0 1	0 4
				Terjalannya komunikasi antara pimpinan partai politik dan tokoh masyaraka t		Terjalannya komunikasi antara pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

1.03.1.03. 02.40			Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Keormasan	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Keormasan	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Keormasan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8	0	0	2	0
				Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus Ormas akan fungsi dan peran serta Ormas dalam kehidupan bernegara		Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus Ormas akan fungsi dan peran serta Ormas dalam kehidupan bernegara					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

**BAB IV
PENUTUP**

RENJA Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang, April 2020
Pit. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATAEN PADANG PARIAMAN

SADRIL, S.Sos. M.M
NIP. 19650204 198603 1 002